

KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN

Khairina¹⁾, Muhammad Syaifudin²⁾

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Indonesia

khairina@gmail.com, muhammad_syaifudin@uin-suska.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang apa itu konsep dasar analisis kebijakan, tujuan dari analisis kebijakan, dasar dari analisis kebijakan, jenis dan sudut pandangan analisis kebijakan dari Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka atau library reseach, studi pustaka merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan sumber pustaka sebagai sumber dalam kegiatan penelitian dan juga mencari informasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada analisis data dan informasi semata. Sebaliknya, analisis kebijakan melibatkan pertimbangan terhadap semua aspek yang terkait dengan proses pembuatan suatu kebijakan. Ini mencakup analisis terhadap masalah yang dihadapi, pengumpulan informasi yang relevan, analisis informasi tersebut, penentuan opsi kebijakan yang mungkin, dan akhirnya penyampaian opsi-opsi tersebut kepada para pengambil Keputusan dan Konsep kebijakan adalah salah satu pesan syari'at yang ditekankan dalam al-Qur'an, yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan manusia

Keywords: Konsep dasar, analisis, kebijakan

PENDAHULUAN

Kebijakan selalu menjadi sumber perdebatan di Tengah masyarakat, baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau yang dikeluarkan oleh dunia bisnis, organisasi profit, atau organisasi non profit. Masyarakat secara aktif terlibat dalam diskusi mengenai kebijakan, baik yang terkait dengan internal organisasi maupun yang berdampak pada lingkup yang lebih luas, serta terus memantau setiap masalah yang muncul dengan tujuan mencari kebijakan yang tepat dan efektif. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut analisis kebijakan, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep kebijakan ini. Hal ini perlu dilakukan karena konsep dan istilah kebijakan digunakan dalam berbagai konteks yang beragam, dan hal ini dapat menghasilkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep dan istilah tersebut serta mungkin memunculkan paradigma baru.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik semakin penting. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 7 ayat 2 huruf, menegaskan kewajiban pejabat pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengemukakan pendapat mereka sebelum membuat keputusan atau tindakan yang akan diambil sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam administrasi pemerintahan. (Hernato Suaib, 2022)

Pada dasarnya kebijakan diharapkan dapat membawa angin segar, tetapi pada

¹ (Meutia Fitri, Intan, 2017)

kenyataannya kebijakan sering menjadi polemik ditengah Masyarakat, dimana penjadi topik pembahasan diantara para anggota organisasi dan adanya pro kontra ditengah-tengah mereka

Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa definisi analisis kebijakan?
2. Bagaimana Urgensi dari analisis kebijakan?
3. Bagaimana tahapan analisis kebijakan?
4. Bagaimana bentuk karekteristik analisis kebijakan?
5. Apa manfaat analisis kebijakan?
6. Bagaimana Perspektif Islam tentang analisis kebijakan?

Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjabarkan definisi analisis kebijakan
2. Untuk mengetahui Urgensi dari analisis kebijakan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tahapan analisis kebijakan
4. Untuk mengetahui dan menjabarkan tentang karekteristik analisis kebijakan
5. Untuk mengetahui manfaat dari analisis kebijakan
6. Untuk mengetahui perspektif analisis kebijakan dari sudut pandangan Islam

Manfaat

Makalah tentang Konsep dasar analisis kebijakan ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik untuk penulis maupun pembaca. Diantara manfaat dari makalah ini adalah:

1. Dapat menambah wawasan bagi pembaca
2. Dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi pembaca terkait analisis kebijakan
3. Dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi di lapangan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode *Library research* atau penelitian pustaka. Metode ini fokus pada pengumpulan informasi, data, dan literatur dari berbagai sumber yang relevan untuk topik yang dibahas dalam makalah. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah dokumentasi, yakni mengacu pada pengumpulan data melalui referensi tertulis, termasuk buku, jurnal, artikel, laporan, dan sumber-sumber pustaka lainnya. Dalam hal ini, penulis mengandalkan informasi yang ada di literatur sebagai dasar untuk mengembangkan makalah, dan analisis deskriptif yakni, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data. Ini melibatkan penjelasan dan pemahaman mendalam tentang informasi yang dikumpulkan dari data terkini dan historis

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah kegiatan berpikir kritis dan praktis yang bertujuan untuk

menghasilkan pemahaman serta mengevaluasi dengan seksama serta mengkomunikasikan pengetahuan yang berkaitan dengan proses kebijakan. Lebih lanjut, analisis kebijakan bisa dianggap sebagai bidang studi yang memanfaatkan berbagai pendekatan penelitian yang beragam dalam konteks perdebatan dan argumentasi politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kebijakan (Asmad, 1980)

Menurut Iskandar dalam A. Ramdani, Kebijakan adalah serangkaian langkah, program, tindakan, keputusan, atau pendekatan yang diambil oleh berbagai pihak (seperti aktor atau entitas yang terlibat) sebagai langkah menuju pemecahan masalah yang ada. Menetapkan kebijakan merupakan elemen kunci dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Selanjutnya menurut Thoha dalam A. Ramdani, kebijakan memiliki dua komponen : a) Kebijakan adalah suatu tindakan sosial yang tidak dapat dianggap sebagai peristiwa yang terjadi secara individual atau terpisah. Oleh karena itu, kebijakan adalah hasil dari proses perumusan oleh pemerintah yang didasarkan pada berbagai kejadian dalam masyarakat. Kejadian-kejadian ini berkembang dalam konteks kehidupan sosial dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, atau asing bagi masyarakat. b) Kebijakan adalah respons terhadap peristiwa yang terjadi, baik dengan tujuan untuk menciptakan harmoni di antara pihak-pihak yang bertentangan maupun memberikan insentif kepada pihak-pihak yang terlibat agar melakukan tindakan bersama sebagai tanggapan terhadap perlakuan yang tidak rasional terhadap upaya bersama mereka. (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Weimer dan Vining dalam Asmad mengemukakan bahwa analisis kebijakan bukanlah suatu keputusan, tapi merupakan arahan yang berisikan nasehat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuat kebijakan dalam menghadapi suatu permasalahan dalam suatu organisasi. (Asmad, 1980)

Dapat kita simpulkan pengertian dari kebijakan adalah suatu usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam upaya mencari solusi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam waktu tertentu. Dan kebijakan ini pada dasarnya masih bersifat umum

B. Urgensi Analisis Kebijakan

Pelaksanaan analisis kebijakan menjadi sangat penting karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam memperoleh informasi terkait dengan keputusan yang akan diambil. Proses analisis kebijakan ini dapat dilakukan melalui penyelidikan, klarifikasi, dan pemisahan permasalahan yang mengidentifikasi ketidaksesuaian antara tujuan dan upaya, menyajikan opsi alternatif, serta menyarankan cara untuk mengkomunikasikan ide dalam perumusan kebijakan. Kontribusi utama dari pelaksanaan analisis kebijakan ini adalah memberikan rekomendasi yang terkait dengan keputusan dengan mempertimbangkan sensitivitas dan prioritas parameter yang telah ditentukan. Meskipun bukan elemen utama dalam proses pengambilan kebijakan, analisis kebijakan tetap penting karena merupakan bagian integral dari penilaian lembaga tersebut. Badjuri dan Yuwono mengidentifikasi lima alasan mengapa analisis kebijakan sangat penting: 1) Analisis kebijakan dilakukan melalui metode ilmiah yang objektif, rasional, dan saintifik, menunjukkan bahwa kebijakan dibuat dengan landasan ilmiah untuk memastikan kebijakan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. 2) Analisis kebijakan yang dilakukan dengan cermat dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Analisis kebijakan mengakui kompleksitas, keterkaitan, dan ketergantungan antara berbagai aspek kebijakan, sehingga penting untuk memastikan dampak yang holistik. 4) Analisis kebijakan dapat memberikan panduan yang

komprehensif untuk pelaksanaan dan penilaian kebijakan karena dapat memiliki dampak substansial dan strategis yang berkelanjutan. 5) Analisis kebijakan juga dapat membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan melalui partisipasi publik, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses analisis kebijakan. (Faiz & Kurniawaty, 2022)

Santoso dalam Raviansyah menyebutkan bahwa, Sebagai tugas yang sangat penting di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah memiliki dasar kuat untuk merancang kebijakan publik yang akan berdampak pada masyarakat, yang pada akhirnya merupakan pemegang kedaulatan. Dengan peran sebagai pemegang kekuasaan yang bertindak atas nama negara, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan kebijakan publik yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan tersebut. (Raviansyah, 2022)

Lembaga Administrasi Negara dalam Verda Kirana bahwa pelaksanaan analisis kebijakan berdasarkan bukti adalah langkah yang sangat penting untuk diadopsi. Hal ini karena pendekatan kebijakan yang didasarkan pada bukti dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur kualitas kebijakan. Selain berfungsi sebagai indikator kualitas kebijakan, metode ini juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan di masa depan dengan dukungan bukti, data, dan informasi yang relevan. Analisis kebijakan ini melibatkan kegiatan seperti penelitian, klarifikasi, serta pemisahan masalah yang dapat mengungkapkan ketidakcocokan antara tujuan dan upaya, menyajikan alternatif solusi, dan mengusulkan cara untuk menyampaikan ide dalam proses perumusan kebijakan. (Marwiyah et al., 2023)

Meitia dalam Verda Kirana dimana kontribusi penting dari proses implementasi analisis kebijakan adalah memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan keputusan dengan mempertimbangkan sensitivitas dan prioritas parameter yang telah ditetapkan. Ini juga termasuk dalam upaya untuk meningkatkan regulasi yang sesuai (Lidwina, 2020). Meskipun analisis kebijakan bukan elemen utama dalam proses pengambilan keputusan, namun penting karena merupakan bagian integral dari evaluasi lembaga tersebut. Analisis kebijakan yang didukung oleh bukti dapat berfungsi sebagai alat untuk menghindari pembentukan kebijakan yang sembrono dan tidak menguntungkan masyarakat umum (Meutia, 2017). (Verda Kirana, 2022)

C. Tahapan Analisis Kebijakan

Tahapan dalam analisis kebijakan dikemukakan Dunn dalam Asmad dengan langkah-langkah berikut: 1) Identifikasi masalah, yang melibatkan pengumpulan informasi tentang kondisi yang menyebabkan masalah kebijakan. 2) Proses peramalan, yang memberikan informasi mengenai dampak yang mungkin terjadi di masa depan akibat penerapan alternatif kebijakan. 3) Penyusunan rekomendasi, yang menyediakan informasi mengenai nilai atau manfaat relatif dari dampak di masa depan dari berbagai solusi untuk masalah tersebut. 4) Pemantauan, yang menghasilkan informasi tentang konsekuensi saat ini dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan. 5) Evaluasi, yang, seperti dalam bahasa sehari-hari, memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil pemecahan atau penanggulangan masalah. (Asmad, 1980).

Tahapan Analisis Kebijakan menurut William N Dunn dan kawan-kawan adalah sebagai berikut: (William N. Dunn, 2003)

FASE	KARAKTERISTIK	ILUSTRASI
PENYUSUNAN AGENDA	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan	Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan

	masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak tersentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama	rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih
FORMULASI KEBIJAKAN	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah . Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah efektif dan keputusan peradilan, dan Tindakan legislative	Peradilan Negara Bagian mempertimbangkan pelarangan menggunakan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap Perempuan dan minoritas
ADOPSI KEBIJAKAN	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan mayoritas legislative, konsesus diantara direktur Lembaga, atau keputusan peradilan.	Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus <i>Roe.v.wade</i> tercapai keputusan mayoritas bahwa Wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia	Bagian keuangan Kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak
PENILAIAN KEBIJAKAN	Unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan	Kantor akutansi publik memantau program-program kesejahteraan social seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi.

Secara umum, langkah-langkah dalam proses kebijakan menurut Dachi adalah sebagai berikut:(Dachi, 2017)

- 1) Perancangan Kebijakan: Pembuatan kebijakan melibatkan identifikasi masalah, pemilihan opsi alternatif, penanganan masalah, dan rekomendasi yang disetujui oleh pihak berwenang, serta pengesahan kebijakan tersebut.

- 2) Komunikasi dan Penyebaran Kebijakan, termasuk pelatihan pegawai jika diperlukan.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan, yang mencakup pelaksanaan kebijakan setelah disahkan. Ini bisa berarti pelaksanaan langsung oleh pemerintah atau hanya mengatur kebijakan tanpa pelaksanaan langsung (kebijakan campuran).
- 4) Pemantauan Kebijakan, yang melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan kebijakan.
- 5) Evaluasi Kebijakan, yaitu penilaian terhadap perbedaan sebelum dan setelah pelaksanaan suatu kebijakan.



Gambar Tahapan Analisis Kebijakan (Dachi, 2017)

D. Karakteristik Analisis Kebijakan

Menurut W. Hogwood & Lewis A. Gunn dalam Aswan karakteristik yang membedakan analisis kebijakan dari jenis analisis lainnya adalah sebagai berikut: (Dr.Drs.Awan Y. Abdoellah, M Si & Dr Yudi Rustiana, n.d.)

- 1) Terapan daripada Ilmiah Murni: Secara umum, analisis kebijakan lebih berfokus pada penerapan daripada hanya aspek ilmiah murni. Ini berarti bahwa analisis kebijakan lebih mendekati permasalahan praktis daripada hanya memberikan deskripsi dan pandangan teoritis. Ini membantu dalam memahami proses pembuatan dan implementasi kebijakan sebagai suatu sistem tindakan atau sebagai sub-sistem dalam kerangka sistem yang lebih luas.
- 2) Bersifat Interdisipliner dan Multi-Disipliner: Analisis kebijakan bukanlah disiplin tunggal yang hanya berfokus pada masalah atau ahli tertentu. Sebaliknya, analisis kebijakan bersifat multi-disipliner dan menggunakan pendekatan terpadu yang menggabungkan unsur-unsur yang unggul dari berbagai disiplin ilmu. Ini memungkinkan pendekatan yang holistik terhadap masalah kebijakan.
- 3) Mencakup hirarki tujuan dan perbaikan dalam cara perumusan dan penilaian terhadap

opsi kebijakan alternatif.

- 4) Berorientasi pada Klien: Analisis kebijakan selalu berhubungan dengan konteks sosial dan politiknya. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika analisis kebijakan tidak mempertimbangkan klien tertentu dalam pelaksanaan kegiatannya. Rekomendasi kebijakan biasanya disusun untuk membantu mencari solusi yang masuk akal terhadap masalah yang telah diidentifikasi oleh klien.

Dari beberapa kriteria analisis Kebijakan William Dunn dalam Aswanmengemukakan dimana karakteristik analisis kebijakan mempunyai kata kunci yakni **kerangka yang terintegrasi** yang berorientasi kepada masalah, yang didasarkan kepada proses pengkajian yang terdiri dari lima komponen atas informasi lainnya, dimana kelima komponen itu adalah: masalah kebijakan, (*Policy problems*), masadepan kebijakan (*policy alternative*), aksi kebijakan (*policy action*), hasil kebijakan (*policy outcomes*), dan kinerja kebijakan (*policy performance*). Dan kelima komponen ini dirubah melalui lima proses yakni: permusan masalah (*problem structure*), peramalan (*forecasting*), pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*) dan rekomendasi (*recommendation*).

E. Manfaat Analisis Kebijakan

Menurut Lasswell dalam Dunn, Analisis Kebijakan adalah upaya untuk menghasilkan pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan. Ini melibatkan penyelidikan tentang penyebab, dampak, dan kinerja dari kebijakan dan program publik. Dengan menghubungkan pemahaman tentang kebijakan dengan proses pembuatannya, para anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, serta warga negara yang terlibat dalam proses kebijakan publik dapat menggunakan hasil analisis kebijakan untuk meningkatkan proses dan kinerja pembuatan kebijakan. Karena efektivitas pembuatan kebijakan sangat tergantung pada akses terhadap informasi, komunikasi, dan penggunaan analisis kebijakan, hal ini menjadi penting dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik. (William N. Dunn, 2003)

Analisis kebijakan dapat membantu menghindari pembuatan kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan yang sempit atau kekuasaan semata. Meskipun diakui bahwa pertimbangan ilmiah, rasional, dan obyektif dalam pembuatan kebijakan publik seringkali sulit dan memakan waktu, dalam praktiknya, faktor-faktor politik masih sering mendominasi di tingkat pusat maupun daerah. Analisis kebijakan diharapkan dapat membantu mengatasi hal ini, karena memberikan informasi dan argumen yang lebih komprehensif yang dapat diterima oleh masyarakat. (William N. Dunn, 2003)

F. Analisis Kebijakan dalam perspektif Islam

Konsep kebijakan adalah salah satu pesan syari'at yang ditekankan dalam al-Qur'an, yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ini berlaku baik dalam skala yang lebih kecil, seperti dalam rumah tangga yang terdiri dari keluarga kecil, maupun dalam skala yang lebih besar, seperti dalam sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat. Konsep kebijakan ini merupakan landasan yang mengukuhkan kesetaraan hak dan kewajiban dalam kehidupan berkelompok, di mana pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama dalam membuat peraturan yang mengikat dalam masyarakat. Konsep ini telah diterapkan pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam Surat Ali-'Imraan ayat 159. "(Rosyidi, 2019)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (*Al Quran Digital*, n.d.)

"Surat Ali-'Imraan ayat 159 dalam Al-Qur'an menyoroti pentingnya sikap lemah-lembut dan kerendahan hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Ayat ini memberikan panduan tentang bagaimana bersikap jika menghadapi kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap perintah, dengan mengajak untuk memberikan pengampunan, memohonkan ampun, dan berunding dengan bijak. Ayat ini juga terkait dengan peristiwa Perang Uhud dan menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan instruksi Nabi." (Rosyidi, 2019)

KESIMPULAN

Analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada analisis data dan informasi semata. Sebaliknya, analisis kebijakan melibatkan pertimbangan terhadap semua aspek yang terkait dengan proses pembuatan suatu kebijakan. Ini mencakup analisis terhadap masalah yang dihadapi, pengumpulan informasi yang relevan, analisis informasi tersebut, penentuan opsi kebijakan yang mungkin, dan akhirnya penyampaian opsi-opsi tersebut kepada para pengambil keputusan.

Perumusan masalah adalah. Perkembangan dari situasi masalah ini melibatkan pencarian masalah yang masih tahap yang paling fundamental dalam proses pembentukan kebijakan. Tahap ini melibatkan identifikasi masalah yang akan diatasi oleh kebijakan tersebut. Prosesnya dimulai dari pengakuan atau kesadaran tentang adanya suatu situasi masalah memiliki berbagai penafsiran, lalu berlanjut ke identifikasi masalah inti (masalah substantive) melalui pendefinisian masalah. Selanjutnya, masalah yang telah diuraikan ini menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan (masalah formal). Setelah kebijakan dibuat berdasarkan masalah yang telah dispesifikasikan, kita kembali lagi ke situasi masalah awal yang merupakan hasil dari kesadaran akan masalah tersebut.

Dalam tahap perumusan masalah ini, pentingnya niat baik dan komitmen dari pihak berwenang dalam pemerintahan sangatlah krusial. Hal ini memastikan bahwa selama proses tersebut, klasifikasi yang jelas dan tegas dapat ditemukan, yaitu mana yang termasuk masalah yang bersifat pribadi dan mana yang termasuk masalah yang merupakan masalah publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Digital*. (n.d.). Republika.Id.
Asmad. (1980). *Konsep Dasar Analisis Kebijakan*. 1980.
Dachi, R. A. (2017). *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan*. Deepublish.
Dr.Drs.Awan Y. Abdoellah, M Si & Dr Yudi Rustiana, M. S. (n.d.). *BUKU - TEORI DAN ANALISIS*

KEBIJAKAN PUBLIK.pdf.

- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2022). Urgensi Pendidikan Nilai di Era Globalisasi. *Jurnal Basicedu*. <https://scholar.archive.org/work/zw7effae7rcz7ln32r6k7zwyv4/access/wayback/https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/2581/pdf>
- Hernato Suaib, A. S. R. S. R. dan A. P. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik* (Cetakan Pe). Humanities Genius.
- Marwiyah, S., Busthomi, A. N., & Lailatul Fitria, N. J. (2023). Urgensi analisis berbasis bukti dalam indeks kualitas kebijakan emergency call 112 Kota Probolinggo. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 82–92. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13487>
- Meutia Fitri, Intan, P. . (2017). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik, April*, 1–215.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Raviansyah. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rosyidi, M. H. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Perspektif Islam dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah. *MUDIR: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/MPI/article/view/23>
- Verda Kirana, P. (2022). Asbabun Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Makna Qur'an. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Agama Islam*, 12(1), 115–123.
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).